

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Blitar, Januari 2014

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

(Drs. MOLAN, MM)

NIP. 19850922 198503 1 011

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BLITAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2014 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2014 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 3.429.055.000,- mencapai 95,20 % dari anggarannya.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.14.632.898.659,- atau mencapai 97,93 % dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2014 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 34.508.885.825,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 85.105.975,00, investasi jangka panjang sebesar Rp. 0,00, aset tetap sebesar Rp. 34.370.761.050,00, dana cadangan Rp. 0,00 dan aset lainnya sebesar Rp. 53.018.800,00

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 0,00 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 0,00 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0,00

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.34.508.885.825,00 yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 85.105.975,00 ekuitas dana investasi sebesar Rp. 34.423.779.850,00 dan ekuitas dana cadangan sebesar Rp. 0,00

c. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 3/E);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 42/E);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penambahan Lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 28/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

1.3. Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2014 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan pengeluaran.

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2014, SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mempunyai 14 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD ;
4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan ;
5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ;
6. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan ;
7. Program Pengelolaan Pasar Daerah ;
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
10. Program Peningkatan Kapasitas Iptek sistem Produksi ;

11. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ;
12. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri ;
13. Program Pengembangan Sentra sentra Industri Potensial ;
14. Program Lingkungan Sosial.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 secara keseluruhan sebesar Rp. (11.464.698.657,00) yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Pendapatan	3.601.930.367,00
2	Belanja Operasi	12.579.962.774,00
3	Belanja Modal	2.486.666.250,00
	Surplus/(Defisit)	(11.464.698.657,00)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh SKPD Dinas Perindustrian dn Perdagangan Kabupaten Blitar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014 Nomor 9 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp. (11.464.698.657,00) terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp. 15.066.629.024,00 dan Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 3.601.930.367,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar selama tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1	Pendapatan	3.601.930.367,00	3.429.055.000,00	95,20
	- Pendapatan Asli Dae- rah	3.601.930.367,00	3.429.055.000,00	95,20
	- Hasil Retribusi Daerah	3.012.381.400,00	3.024.055.000,00	100,39
	- Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan	589.548.967,00	405.000.000,00	68,70
2	Belanja	15.066.629.024,00	14.632.898.659,00	97,12
	- Belanja Operasi	12.579.962.774,00	12.219.913.659,00	97,14
	- Belanja Modal	2.486.666.250,00	2.412.985.000,00	97,04
	- Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(11.464.698.657,00)	(11.203.843.659,00)	97,72

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian pendapatan daerah mencapai tahun 2014 mencapai hasil 95,20 persen dari target yang ditetapkan, hal ini dicapai dari hasil penerimaan pendapatan asli daerah yang optimal yaitu sebesar Rp. 3.429.055.000,00 dari target sebesar Rp. 3.601.930.367,00 atau 95,20 persen.

3.1.2. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2014 sebesar Rp. 14.632.898.659,00 atau 97,12 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 433.730.365,00 atau 2,88 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
1.	Belanja Tidak Langsung	4.640.485.070,00	4.422.522.838,00	95,30
2.	Penyediaan dan peningkatan adm. Perkantoran	494.212.704,00	471.403.868,00	95,38
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	383.330.000,00	372.230.000,00	97,10
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.800.000,00	7.222.300,00	92,59
5.	Pengujian Kadar Iodium Garam Konsumsi dan Pengawasan peredaran garam	38.840.00,00	28.825.000,00	74,21
6.	Pelatihan Teknis Bagi IKM Masyarakat di Kab. Blitar	115.400.000,00	110.040.000,00	95,36
7.	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	41.230.000,00	37.620.000,00	91,24
8.	Pembinaan pada pedagang jamu di Kab Blitar	28.880.000,00	21.620.000,00	74,86
9.	Fasilitasi Bagi IKM Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	1.020.080.000,00	1.012.480,00	99,25
10.	Pemb. IKM Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Indutri	886.510.000,00	878.920.000,00	99,14
11.	Pendampingan BUMD	67.865.000,00	49.855.000,00	73,46
12.	Pemb. Dan Pengendalian BUMD	13.330.000,00	8.709.500,00	65,34
13.	Pemb dan Fasilitasi Penyelesaian Kredit Program	12.520.000,00	9.688.873,00	77,39

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
14.	Promosi Produk Unggulan Kabupaten Blitar	246.800.000,00	245.584.780,00	99,51
15.	Pengembangan Pengelolaan Sistem Resi Gudang	18.900.000,00	15.000.000,00	79,37
16.	Promosi Produk Unggulan Kab Blitar melalui Media Elektronika	656.905.000,00	653.390.000,00	99,46
17.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	178.490.000,00	176.490.000,00	98,88
18.	Penyediaan Sarana Informasi melalui Pendataan Industri di Kab Biltar	166.280.000,00	146.986.500,00	88,40
19.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional	310.143.650,00	306.850.000,00	98,94
20.	Renovasi Pasar Tradisional (DAK dan Pendamping DAK)	1.853.022.600,00	1.797.635.000,00	97,01
21.	Peningkatan Pelayanan Pasar dan Monev	227.100.000,00	225.500.000,00	99,30
22.	Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT Dalam Rangka Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Kegiatan Pemberian Bantuan Peralatan Produksi	1.620.000.000,00	1.603.835.000,00	99,00
23.	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	2.038.505.000,00	2.030.490.000,00	99,61
	Total	15.066.629.024,00	14.632.898.659,00	97,12

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
- b. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- c. Belum samanya tingkat pemahaman masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

1) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) **Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) **Gedungan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

5) **Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap

pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penambahan Lampiran atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Blitar tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Pengakuan

Pengakuan persediaan sesuai nilai perolehannya, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

b. Kapitalisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014.

c. Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Blitar belum menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan inventarisasi aset.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>
a. Aset	34.508.885.825,00	32.118.633.657,00

Saldo Aset SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 34.509.085.825,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(1)	Aset Lancar	85.105.975,00	128.859.100,00
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	34.370.761.050,00	31.928.611.757,00
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	53.018.800,00	61.162.800,00
Jumlah Aset		34.508.885.825,00	32.118.633.657,00

	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>
1) Aset Lancar	85.105.975,00	128.859.100,00

Saldo Aset Lancar SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 85.105.975,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(a)	Kas	11.039.200,00	14.405.700,00
(b)	Piutang Retribusi	78.544.300,00	72.872.000,00
(c)	Penyisihan Piutang tidak tertagih	(5.382.525,00)	(5.165.600,00)
(d)	Persediaan	905.000,00	46.747.000,00
Jumlah		85.105.97500	128.859.100,00

	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>
(a) Kas	11.039.200,00	14.405.700,00

Saldo Kas SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 11.039.200,00 terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp.)	Tahun 2013 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	11.039.200,00	14.405.700,00
Jumlah		11.039.200,00	14.405.700,00

(1) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 11.039.200,00 merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Penerimaan Pembantu per tanggal 31 Desember 2014 dan telah disetor ke Kasda pada Januari 2015, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Bendahara Penerimaam Pembantu Pasar Kademangan	480.000,00
2.	Bendahara Penerimaam Pembantu Pasar Garum	115.000,00
3.	Bendahara Penerimaam Pembantu Pasar Talun	345.000,00
4.	Bendahara Penerimaam Pembantu Pasar Lodooyo	1.070.000,00
5.	Bendahara Penerimaam Pembantu Pasar Srengat	1.473.300,00
6.	Bendahara Penerimaam Pembantu Pasar Kanigoro	504.000,00
7.	Bendahara Penerimaam Pembantu Pasar Bendorejo	1.215.000,00
8.	Bendahara Penerimaam Pembantu Pasar Sidorejo	165.000,00
9.	Bendahara Penerimaam Pembantu Pasar Wlingi	2.824.200,00
10.	Bendahara Penerimaam Pembantu Pasar Kesamben	2.722.000,00
11.	Bendahara Penerimaam Pembantu Pasar Nglegok	125.700,00
	Jumlah	11.039.200,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(b) Piutang Retribusi	78.544.300,00	72.872.000,00

Saldo Piutang Retribusi SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 78.544.300,00 terdiri dari dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Piutang Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan (Sewa Kios) Tahun 2009	9.473.500,00
2	Piutang Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan (Sewa Kios) Tahun 2010	3.831.700,00
3	Piutang Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan (Sewa Kios) Tahun 2011	11.419.600,00
4	Piutang Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan (Sewa Kios) Tahun 2012	13.585.000,00
5	Piutang Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan (Sewa Kios) Tahun 2013	4.420.500,00
6	Piutang Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan (Sewa Kios) Tahun 2014	35.814.000,00
Jumlah		78.544.300,00

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
(c) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	5.382.525,00	5.165.600,00

Saldo piutang Piutang Tidak Tertagih Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 5.382.525 terdiri dari:

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Piutang Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan (Sewa Kios) Tahun 2009	1.894.700,00
2	Piutang Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan (Sewa Kios) Tahun 2010	766.340,00
3	Piutang Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan (Sewa Kios) Tahun 2011	1.141.960,00
4	Piutang Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan (Sewa Kios) Tahun 2012	1.358.500,00
5	Piutang Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan (Sewa Kios) Tahun 2013	221.025,00
Jumlah		5.382.525,00

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
(d) Persediaan	905.000,00,00	46.747.000,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 905.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	320.000,00
(2)	Amplop	90.000,00
(3)	Blangko, Map dan kertas kop	495.000,00
	Jumlah	905.000,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(a) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(5.382.525,00)	(5.165.600,00)

Untuk penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp. 5.382.525,00 dengan perincian sebagai berikut

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios) Tahun 2009	1.894.700,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios) Tahun 2010	766.340,00
3	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios) Tahun 2011	1.141.960,00
4	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios) Tahun 2012	1.358.500,00
5	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios) Tahun 2013	221.025,00
6	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios) Tahun 2014	0,00
Jumlah		5.382.525,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1) Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo Investasi jangka Panjang SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitarper 31 Desember 2013 sebesar nihil.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
2) Aset Tetap	34.370.761.050,00	31.928.611.757,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 31.928.611.757,00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 34.370.761.050,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(a)	Tanah	19.134.194.000,00	19.134.194.000,00
(b)	Peralatan dan Mesin	1.631.632.900,00	1.293.968.607,00
(c)	Gedung dan Bangunan	13.584.769.150,00	11.480.284.150,00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.165.000,00	14.165.000,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
(f)	Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Aset		34.370.761.050,00	31.928.611.757,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam TA 2014 sebesar Rp. 2.442.149.293,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2013 ditambah perolehan TA 2014 dan dikurangi TA 2014 (Rp. 34.370.761.050,00 + Rp. 24.447.009.293,00 – Rp.4.860.000,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(a) Tanah	19.134.194.000,00	19.134.194.000,00

Saldo Tanah SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 19.134.194.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014 **Rp. 19.134.194.000,00**

Penambahan Aset Tetap Tanah

Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal		
Hibah		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Koreksi	_____	+
Jumlah penambahan		0,00

Pengurangan Aset Tetap Tanah

Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
Jumlah Pengurangan		(0,00) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2014 **Rp. 19.134.194000,00**

Rincian perolehan aset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 6 *Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2014*

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	1.631.632.900,00	1.293.968.607,00

Saldo peralatan dan mesin SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.631.632.900,00 dengan perincian sebagai berikut.Rincian dapat dilihat pada *lampiran mutasi aset tetap 2014*

Saldo Awal Per 1 Januari 2014	Rp. 1.293.968.607,00
Penambahan Peralatan dan Mesin	
Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan	
Jasa	
Belanja Modal	Rp. 308.500.000,00
Hibah	
Mutasi	Rp. 19.700.000,00
Reklasifikasi	Rp. 11.024.000,00
Koreksi	Rp. 3.300.293,00 +
Jumlah penambahan	Rp. 342.524.293,00
Pengurangan Peralatan dan Mesin	
Penghapusan	(.....)
Mutasi	(.....)
Hibah	(.....)
Reklasifikasi	(Rp. 2.880.000,00)
Koreksi	(Rp. 1.980.000,00) +
Jumlah Pengurangan	(Rp. 4.860.000,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2014	Rp. 1.631.632.900,00
Rincian perolehan asset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 7 <i>Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014</i>	

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	13.584.769.150,00	11.480.284.150,00

Saldo gedung dan bangunan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 13.584.769.150,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014	Rp. 11.480.284.150,00
Penambahan Gedung dan Bangunan	
Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan	
Jasa	
Belanja Modal	Rp. 2.104.485.000,00
Hibah	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Koreksi	+
Jumlah penambahan	Rp. 2.104.485.000,00
Pengurangan Gedung dan Bangunan	
Penghapusan	(.....)
Mutasi	(.....)
Hibah	(.....)
Reklasifikasi	(.....)
Koreksi	(.....) +
Jumlah Pengurangan	(0,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2014	Rp. 13.584.769.150,00

Rincian perolehan asset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada Lampiran 9 *Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014*

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	14.165.000,00	14.165.000,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 14.165.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014	Rp.	14.165.000,00
Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Js		
Belanja Modal		
Hibah		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Koreksi		
Jumlah penambahan	Rp.	0,00
Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi		
Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	
Jumlah Pengurangan	(Rp. 0,00)	+
Saldo Akhir Per 31 Desember 2014	Rp.	14.165.000,00

Rincian perolehan asset tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi dapat dilihat pada Lampiran 10 *Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2014*

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 6.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014	Rp.	6.000.000,00
Penambahan Aset Tetap Lainnya		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Js		
Belanja Modal		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Koreksi		
Jumlah penambahan	Rp.	0,00
Pengurangan Aset Tetap Lainnya		
Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	
Jumlah Pengurangan	(Rp. 0,00)	+
Saldo Akhir Per 31 Desember 2014	Rp.	6.000.000,00

Rincian perolehan asset tetap lainnya dapat dilihat pada Lampiran 11 *Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014*

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo aset tetap berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014 sebesar Nihil.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
3) Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2014 sebesar Nihil.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
4) Aset Lainnya	53.018.800,00	61.162.800,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp.61.162.800,00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 53.018.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	0,00	0,00
(b)	Aset Lain-lain	53.018.800,00	61.162.800,00
Jumlah Aset		53.018.800,00	61.162.800,00

Sedangkan mutasi pengurangan dalam Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 8.144.000,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2013 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2014 (Rp. 61.162.800,00 - Rp. 53.018.800,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
(a) Aset Tak Berwujud	0,00	0,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2014 sebesar Rp.0,00 merupakan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014	Rp.	0,00
Penambahan Aset Tak Berwujud	Rp.	0,00

Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal		
Hibah		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Koreksi		
Jumlah penambahan	+	Rp. 0,00

Pengurangan Aset Tak Berwujud

Penghapusan	(.....)		
Mutasi	(.....)		
Hibah	(.....)		
Reklasifikasi	(.....)		
Koreksi	(.....)		
Jumlah Pengurangan		(Rp. 0,00)	+
Saldo Akhir Per 31 Desember 2014		Rp. 0,00	

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
(b) Aset Lain-lain	53.018.800,00	61.162.800,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 53.018.800,00 terdiri dari *Aset Tetap yang rusak sebesar Rp. 53.018.800,00* dengan perincian mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014 **Rp. 61.162.800,00**

Penambahan Aset Lain-Lain

Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan		
Jasa		
Belanja Modal		
Hibah		
Mutasi		
Reklasifikasi	Rp. 2.000.000,00	
Koreksi		+
Jumlah penambahan		Rp. 2.000.000,00

Pengurangan Aset Lain-lain

Penghapusan		
Mutasi		
Hibah		
Reklasifikasi	(Rp. 10.144.000,00)	
Koreksi		+
Jumlah Pengurangan		(Rp. 10.144.000,00)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2014		Rp. 53.018.800,00

Rincian saldo asset lain-lain sebesar Rp. 53.018.800,00 sebagai berikut:

Nomor	Aset	Rusak (Rp)	Hibah (Rp)
1	Mesin ketik manual standard (14-16)	2.240.000,00	
2	Mesin Penghitung uang	400.000,00	
3	Rak Besi / Metal	600.000,00	
4	Fiilig besi / Metal	5.760.000,00	
5	Filling kayu	1.440.000,00	
6	Peti uang	240.000,00	
7	Papan Visuil	240.000,00	
8	Peta	320.000,00	
9	Kursi kayu / rotan / bambu	540.000,00	
10	Zice	3.300.000,00	
11	Kursi Putar	320.000,00	
12	Kursi lipat	780.000,00	
13	Jam Elektrik (alat Pengukur waktu)	48.000,00	

14	Kipas angin (pendingin)	240.000,00	
15	Microphone	40.000,00	
16	Note book	15.000.000,00	
17	Kamera Elektronik	3.240.800,00	
18	Meja kayu / rotan	1.360.000,00	
19	Tape Recorder	150.000,00	
20	Overhead Projector	8.000.000,00	
21	Lemari Kayu	7.800.000,00	
22	Kursi besi / Metal	960.000,00	
Jumlah		53.018.800,00	0,00

Untuk perolehan aset tetap melalui Belanja modal tahun 2014 terdapat aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset tersebut dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan digolongan dalam daftar aset dibawah batasan minimal kapitalisasi aset (Daftar Aset Ekstra Komptabel)dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Aset	Jumlah Unit	Rupiah
1			
2			
3			
Jumlah		0,00	0,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
b. Kewajiban	0,00	0,00
Saldo KewajibanSKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 adalah sebesar Nihil dengan rincian sebagai berikut		

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 0,00 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 0,00. Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan fihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)		0,00
(b)		0,00
(c)		0,00
Jumlah Hutang		0,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2014 sebesar Nihil.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
c. Ekuitas Dana	34.508.885.825,00	32.118.633.657,00

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI). Ekuitas Dana per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 34.508.885.825,00 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1) Ekuitas Dana Lancar	85.105.975,00	128.859.100,00

Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 85.105.975,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Cadangan Piutang	73.161.775,00
(b)	Cadangan Persediaan	905.000,00
(c)	Pendapatan yang Ditangguhkan	11.039.200,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		85.105.975,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
2) Ekuitas Dana Investasi	34.423.779.850,00	31.989.774.557,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang berasal dari selisih Investasi Jangka Panjang ditambah Aset Tetap dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 34.423.779.850,00 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00
(b)	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	34.370.761.050,00
(c)	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	53.018.800,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		34.423.779.850,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
3) Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang dicadangkan, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Nihil

2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
a. Pendapatan	3.429.055.000,00	3.222.416.650,00

Pendapatan meliputi semua penerimaan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2014 serta realisasi Tahun Anggaran 2013, adalah sebagai berikut.

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
(1)	Pendapatan Asli Daerah	3.601.930.367,00	3.429.055.000,00	3.222.416.650,00
	- Hasil Retribusi Daerah	3.012.381.400,00	3.024.055.000,00	2.729.971.100,00
	- Retribusi Jasa Umum.	2.752.124.600,00	2.760.206.800,00	2.475.452.100,00
	- Retribusi Pelayanan Perumahan/Kebersihan	153.065.000,00	154.761.200,00	138.158.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	2.599.059.600,00	2.605.445.600,00	2.337.294.100,00
	- Retribusi Jasa Usaha	258.156.800,00	263.848.200,00	251.519.000,00
	- Retribusi Pemakain Kekayaan Daerah	258.156.000,00	263.848.200,00	251.519.000,00
	- Retribusi Perijinan Tertentu	2.100.000,00	0,00	3.000.000,00
	- Retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol	2.100.000,00	0,00	3.000.000,00
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	589.548.967,00	405.000.000,00	492.445.550,00
	- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD	589.548.967,00	405.000.000,00	492.445.550,00
	- Perusahaan Daerah Savitri Indah	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
	- Bank Perkreditan Rakyat	514.548.967,00	330.000.000,00	417.445.550,00
	Jumlah	3.601.930.367,00	3.429.055.000,00	3.222.416.650,00

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pembagian Deviden dari BUMD untuk yang bersumber dari BPR HAS tidak memenuhi target dikarenakan :

- a. Adanya pembukaan kantor cabang di kec. Sanankulon sehingga mengurangi jumlah penyaluran kredit kepada masyarakat serta terjadinya Deviasi dan menurunnya pendapatan bunga.
- b. Meningkatnya biaya deposito pihak ketiga yang lebih tinggi dari rata-rata suku bunga ketentuan LPS (karena Persaingan Pasar)
- c. Meningkatnya NPL (Netto Performen Loan) berakibat pada perolehan pendapatan karena tingginya biaya penyelesaian kredit bermasalah sehingga biaya operasional dan biaya cadangan /PPAP juga naik.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
b. Belanja	14.632.898.659,00	10.843.276.073,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2014 SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2014 sebagai berikut.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1) Belanja Operasi	12.219.913.659,00	8.366.240.673,00

Belanja Operasi SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2014 Rp. 12.219.913.659,00. dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Operasi	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
(a)	Belanja Pegawai	4.785.140.070,00	4.561.702.838,00	4.338.692.336,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa	2.067.572.704,00	1.957.210.821,00	4.027.548.337,00
(c)	Belanja Hibah	5.727.250.000,00	5.701.000.000,00	0,00
Jumlah		15.066.629.024,00	12.219.913.659,00	10.843.276.073,00

Selanjutnya Belanja Operasi SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar realisasi tahun 2014 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

No	Belanja Operasi	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja Pegawai	4.640.485.070,00	4.422.522.838,00	4.217.142.336,00
	Gaji dan Tunjangan	4.348.166.000,00	4.133.508.768,00	3.966.111.259,00
	Tambahan Penghasilan PNS	141.700.000,00	138.500.000,00	140.550.000,00
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	150.619.070,00	150.514.070,00	110.481.077,00
1.	Jumlah Belanja Tak Langsung (1)	4.640.485.070,00	4.422.522.838,00	4.217.142.336,00
	Belanja Langsung			
	Belanja Pegawai	144.655.000,00	139.180.000,00	121.550.000,00
	Honorarium PNS	144.655.000,00	139.180.000,00	120.550.000,00
	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	1.000.000,00
	Belanja Barang/Jasa	7.794.822.704,00	7.658.210.821,00	4.027.548.337,00
	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	51.117.500,00	41.650.530,00	39.442.730,00
	Belanja Bahan/Material	30.480.000,00	30.200.000,00	37.500.000,00
	Belanja Jasa Kantor	1.230.339.904,00	1.200.936.411,00	467.251.012,00
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.290.000,00	41.290.000,00	29.343.590,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.275.300,00	91.384.050,00	235.204.175,00
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	143.650.000,00	130.984.780,00	97.657.130,00
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.700.000,00	26.700.000,00	18.750.000,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	2.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	37.175.000,00	14.460.000,00	19.015.000,00
	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas	356.245.000,00	343.905.050,00	249.184.200,00
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan	20.100.000,00	20.100.000,00	11.782.000,00

	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	0,00	65.100.000,00
	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	5.727.250.000,00	5.701.000.000,00	2.737.318.500,00
	Belanja Transport Lokal Non PNS	13.950.000,00	8.350.000,00	18.000.000,00
2.	Jumlah Belanja Langsung (2)	10.426.143.954,00	7.797.390.821,00	6.626.133.737,00
	Jumlah 1 dan 2	15.066.629.024,00	12.219.913.659,00	6.626.133.737,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp. 5.701.000.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Kegiatan/Belanja	Rupiah
1.	Pelatihan Teknis bagi IKM masyarakat di Kabupaten Blitar	
	- Alat Pembuat Popcorn	5.800.000,00
	- Peralatan Kripik	73.000.000,00
2.	Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumberdaya	
	- Peralatan Kue	19.600.000,00
	- Penepung Blower Otomatis	99.700.000,00
	- Paving Hidrolis	184.700.000,00
	- Alat Pengolah Kripik	95.800.000,00
	- Mesin laser cuting kayu	174.700.000,00
	- Mesin Oven Kayu	96.800.000,00
	- Vacuum Frying	84.750.000,00
	- Alat Batako	96.700.000,00
	- Alat Pertukangan	79.000.000,00
	- Alat Konveksi	7.700.000,00
	- Alat Opak Gambir	5.700.000,00
	- Mesin Tusuk Ratus	12.650.000,00
	- Alat Bengkel	37.500.000,00
3.	Pembinaan IKM Dalam Memperkuat Jaringan Klaster	
	- Mesin Bandsaw	79.500.000,00
	- Mesin Stone Cruiser	194.500.000,00
	- Mesin Tusuk Sate	174.700.000,00
	- Mesin Pecah Batu	147.500.000,00
	- Mesin Pecah Batu Koral	175.600.000,00
	- Mesin Tusuk Gigi	96.750.000,00
4.	Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima	
	- Tenda Ukuran 3 x 4	44.500.000,00
	- Tenda Ukuran 4 x 6	71.500.000,00
	- Rombongan Cilot / Bakso	49.000.000,00
5.	Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam Rangka mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Kegiatan Pemberian Bantuan Peralatan Produksi	
	- Peralatan pembuatan Batako	119.700.000,00
	- Alat Pertukangan	88.700.000,00
	- Alat vacuum Frying	81.650.000,00
	- Alat Roti	49.500.000,00
	- Peralatan Pembuat Paving	84.500.000,00

	- Alat Bengkel	79.500.000,00
	- Mesin Konveksi	89.500.000,00
	- Alat Opak Gambir	49.500.000,00
	- Alat Kue Basah	49.500.000,00
	- Mesin Pemecah Batu	80.300.000,00
	- Alat Pertukangan	49.700.000,00
	- Mesin Cetak Batu Bata	59.500.000,00
	- Pembuat Roti	48.500.000,00
	- Peralatan Pembuat Paving	87.500.000,00
	- Alat Bengkel	68.500.000,00
	- Mesin Konveksi	48.000.000,00
	- Mesin Pecah Batu	177.500.000,00
	- Peralatan Pembuat Batako	134.500.000,00
	- Mesin Sangrai Tepung	33.800.000,00
	- Mesin Es Krim	47.000.000,00
	- Alat Tenun Tikar	48.900.000,00
6	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	
	- Mesin Penggilingan Tebu	137.500.000,00
	- Mesin Pembuat Pembuat Kripik	122.500.000,00
	- Mesin Stone Cruiser	149.500.000,00
	- Mesin konveksi	99.500.000,00
	- Mesin Digital	198.500.000,00
	- Mesin giling daging	89.000.000,00
	- Mesin Pengolah Plastik	163.500.000,00
	- Mesin Pembuat Bakso	109.500.000,00
	- Mesin Bubut	144.500.000,00
	- Mesin Pemecah Batu	194.500.000,00
	- Mesin Gilingan Stick Otomatis dan Oven Blower Pemanas	138.600.000,00
	- Mesin cetak Paving	147.500.000,00
	- Mesin BandSaaw	159.500.000,00
	- Mesin Batako Vibro	163.500.000,00
Jumlah		5.701.000.000,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
2) Belanja Modal	2.412.985.000,00	2.737.318.500,00

Belanja Modal SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2014 Rp. 2.412.985.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Modal	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 1	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin			
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat			
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	299.600.000,00	288.600.000,00	489.695.400,00

No	Belanja Modal	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	0,00	0,00	50.600.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	55.500.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.900.000,00	19.900.000,00	26.550.000,00
	Jumlah 2	323.500.000,00	308.500.000,00	622.345.400,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.163.166.250,00	2.104.485.000,00	1.854.690.000,00
	Jumlah 3	2.163.166.250,00	2.104.485.000,00	1.854.690.000,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	Jumlah 4	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
	Jumlah (5)	0,00	0,00	0,00
	Total Belanja Modal	2.486.666.250,00	2.412.985.000,00	2.477.035.400,00

BAB VI

PENJELASAN TAMBAHAN

SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada penyusunan Laporan Keuangan 2014 telah melakukan penyesuaian rekening asset tetap sesuai dengan Permendagri 64 tahun 2013 untuk data neraca awal tahun 2014 sehingga asset tetap pada SIMDA dan SIMBADA dapat dibandingkan.

Proses perubahan Rekening Aset Tetap tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Neraca Per 31 Desember 2013 (setelah Audit)
2. Hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah antara BPKAD dengan SKPD per 31 Desember 2013.
3. *Print Out* SIMBADA Rincian Barang Ke Neraca Tahun Anggaran 2013.

Adapun Berita Acara beserta Kertas Kerja penyesuaian rekening asset tetap terlampir

Blitar, 2014
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar

Drs. MOLAN,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580922 198503 1 011